# PT Marga Lingkar Jakarta

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen



# SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT PT MARGA LINGKAR JAKARTA

No. 89/AA/MLJ/I/2017

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Edwin Cahyadi

Alamat

: Plaza Tol Meruya

Jl. Raya Meruya Utara No. 1, Jakarta Barat 11620, Indonesia

No. Telepon

: (021) 589 08462

Jabatan

: Direktur Utama

2. Nama

: Sonhadji S

Alamat

: Plaza Tol Meruya

Jl. Raya Meruya Utara No. 1, Jakarta Barat 11620, Indonesia

No. Telepon

: (021) 589 08462

Jabatan

: Direktur

# Menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Marga Lingkar Jakarta;
- Laporan keuangan PT Marga Lingkar Jakarta telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia;
- a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Marga Lingkar Jakarta dimuat secara lengkap dan benar;
  - Laporan keuangan PT Marga Lingkar Jakarta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Marga Lingkar Jakarta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Januari 2017

PT MARGA LINGKAR JAKARTA

1CAEF317010848

EDWIN CAHYADI Direktur Utama SONHADJI

Direktur

P. H

PT. MARGA LINGKAR JAKARTA

JORR W2 Utara - Plaza Tol Meruya JL Raya Meruya Utara No. 1

Jakarla Barat 11620

Telp. (021) 589 06462 Fox. (021) 589 06447

# PT MARGA LINGKAR JAKARTA LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

# Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1-2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	6-40

\*\*\*\*\*\*



# Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor J.J. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62 21 5289 5000 Fax: +62 21 5289 4100 ev.com/ld

# Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-3086/PSS/2017

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Marga Lingkar Jakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Marga Lingkar Jakarta terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

# Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

# Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angkaangka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada
pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam
laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam
melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang
relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang
prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan
opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup
pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi
akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan
secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



# Laporan Auditor Independen (Ianjutan)

Laporan No. RPC-3086/PSS/2017 (lanjutan)

# Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Marga Lingkar Jakarta tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Purwantono, Sungkoro & Surja

E. Batara Manurung, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0693

27 Januari 2017

# PT MARGA LINGKAR JAKARTA LAPORAN POSISI KEUANGAN

# 31 Desember 2016

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET			
ASET LANCAR Kas dan setara kas Piutang lain-lain Uang muka dan biaya dibayar di muka	2c,2l,4,22,23 2l,5,22,23 6	51.460.262.228 47.024.407.655 791.065.669	80.746.986.870 2.143.936.443 210.880.069
TOTAL ASET LANCAR	·	99.275.735.552	83.101.803.382
ASET TIDAK LANCAR Aset tetap, bersih Dana ditetapkan penggunaannya Aset takberwujud - hak pengusahaan jalan tol Aset pajak tangguhan Aset tidak lancar lainnya Uang muka kontraktor	2e,7 2l,17,22,23 2f,8 2h,12c	25.023.299.316 59.782.499.653 1.803.315.591.760 26.708.592.958 20.000.000 1.377.693.845	7.359.200.011 32.978.551.584 1.869.808.302.093 9.204.592.192 20.000.000
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		1.916.227.677.532	1.919.370.645.880
TOTAL ASET	• •	2.015.503.413.084	2.002.472.449.262
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang kontraktor dan konsultan Utang bank yang jatuh	21,10,23	9.098.167.181	6.819.720.026
tempo dalam waktu satu tahun Utang retensi Utang pajak Beban akrual Provisi pelapisan jalan tol	2l,17,22,23 2l,13,22,23 2h,12a 2j,2l,15,23 2f,2m	126.000.000.000 736.673.537 231.404.824 6.739.802.182 16.575.000.000	97.000.000.000 39.114.821.732 2.674.464.671 21.438.680.746
Liabilitas pembebasan tanah Utang lain-lain	2l,14,22,23,24b 2l,11,22,23	9.070.030.760	218.272.714.548 9.787.282.369
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	- -	168.451.078.484	395.107.684.092
LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang bank - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	21,17,22,23	1.286.102.998.135	1.195.212.921.111
Liabilitas imbalan kerja	2i,17,22,23 2i,16	1.539.763.799	516.776.365
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		1.287.642.761.934	1.195.729.697.476

# PT MARGA LINGKAR JAKARTA LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) 31 Desember 2016

# (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
EKUITAS  Modal saham  Modal dasar - 655.727.000 saham  nilai nominal Rp1.000 per saham  Modal ditempatkan dan disetor  penuh - 655.727.000 saham dan  573.727.000 saham masing-masing			
pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Defisit Penghasilan komprehensif lain - keuntungan aktuarial liabilitas	18	655.727.000.000 (96.388.369.891)	573.727.000.000 (162.273.130.392)
imbalan kerja	16	70.942.557	181.198.086
TOTAL EKUITAS - BERSIH		559.409.572.666	411.635.067.694
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		2.015.503.413.084	2.002.472.449.262

# PT MARGA LINGKAR JAKARTA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (Disajikan dalam rupiah)

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

	Catatan	2016	2015
PENDAPATAN Pendapatan tol	2j,19	337.290.843.165	189.554.103.643
BEBAN PENDAPATAN Beban usaha	2j,20	(115.516.006.894)	(91.918.275.756)
LABA KOTOR		221.774.836.271	97.635.827.887
Biaya keuangan Beban umum dan administrasi Pendapatan keuangan Lain-lain, bersih	2j,15,17 2j,21	(156.715.134.283) (18.497.526.306) 1.190.417.910 664.917.985	(167.762.505.549) (16.562.718.701) 3.257.744.559 3.829.088.674
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		48.417.511.577	(79.602.563.130)
Manfaat pajak penghasilan tangguhan	2h,12d	17.467.248.924	17.900.946.404
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		65.884.760.501	(61.701.616.726)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi tahun berikutnya Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabili imbalan kerja Efek pajak - manfaat (beban) pajak tanggu	16	(147,007,372) 36,751,843	241,597,448 (60,399,362)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		65.774.504.972	(61.520.418.640)

# PT MARGA LINGKAR JAKARTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (Disajikan dalam rupiah)

	Note	Modal saham	Defisit	Penghasilan komprehensif lain	Total ekuitas - bersih
Saldo tanggal 1 Januari 2015		573.727.000.000	(100.571.513.666)		473.155.486.334
Rugi tahun berjalan		-	(61.701.616.726)	-	(61.701.616.726)
Penghasilan komprehensif lain - pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	16	-	<del>-</del>	181.198.086	181.198.086
Saldo tanggal 31 Desember 2015		573.727.000.000	(162.273.130.392)	181.198.086	411.635.067.694
Tambahan setoran modal	18	82.000.000.000	-	-	82.000.000.000
Laba tahun berjalan		-	65.884.760.501	-	65.884.760.501
Penghasilan komprehensif lain - pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	16	-	-	(110.255.529)	(110.255.529)
Saldo tanggal 31 Desember 2016		655.727.000.000	(96.388.369.891)	70.942.557	559.409.572.666

# PT MARGA LINGKAR JAKARTA LAPORAN ARUS KAS

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (Disajikan dalam rupiah)

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

		iibei	
	Catatan	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan pendapatan tol		292.410.371.953	188.033.907.850
Pembayaran kepada pihak ketiga		(50.847.935.619)	(29.168.731.344)
Pembayaran direksi dan karyawan		(19.770.661.581)	(16.496.167.776)
Pembayaran bunga pinjaman		(158.647.499.335)	(150.428.142.503)
Pembayaran uang titipan	11	(1.834.320.167)	(5.005.511.308)
Perolehan bunga		1.190.417.910	3.257.744.559
Penerimaan lain-lain		678.488.136	259.112.900
Kas bersih yang diperoleh dari			
(digunakan untuk) aktivitas operasi		63.178.861.297	(9.547.787.622)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pembayaran utang terkait hak pengusahaan jalan tol		(40.854.905.467)	(83.434.663.457)
Perolehan aset tetap	7,25	(10.356.459.931)	(4.071.910.611)
Pengembalian uang ganti kerugian	7,20	(10.000.400.001)	(4.071.010.011)
pengadaan tanah - landcaping	5	-	1.106.081.767
Kas bersih yang digunakan untuk		·	
aktivitas investasi		(51.211.365.398)	(86.400.492.301)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Perolehan pinjaman bank	17	218.822.442.076	353.365.096.984
Pembayaran utang bank	17	(97.000.000.000)	(7.000.000.000)
Penerimaan setoran modal	18	82.000.000.000	
Penempatan dana ditetapkan penggunaannya	17	(26.803.948.069)	(32.978.551.584)
Pembayaran liabilitas pembebasan tanah	14	(218.272.714.548)	(225.209.458.343)
Kas bersih yang diperoleh dari			
(digunakan untuk) aktivitas pendanaan		(41.254.220.541)	88.177.087.057
PENURUNAN BERSIH			
KAS DAN SETARA KAS		(29.286.724.642)	(7.771.192.866)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4	80.746.986.870	88.518.179.736
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	51.460.262.228	80.746.986.870

Informasi tambahan atas aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 25.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 1. UMUM

#### a. Pendirian Perusahaan

PT Marga Lingkar Jakarta ("Perusahaan") berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 26 Tanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H., notaris di Jakarta. Anggaran dasar Perusahaan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45700.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 15 September 2009. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir pada tanggal 22 Desember 2016 dengan Akta No. 14 dari Notaris Tatyana Indrati Hasjim, S.H. menyangkut keputusan para pemegang saham untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp573.727.000.000 menjadi sebesar Rp655.727.000.000. Perubahan Anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-0024998.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan adalah melaksanakan pengusahaan Jalan JORR W2 Utara (Ulujami - Kebon Jeruk), yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar (JORR) Seksi W2 Utara, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. melakukan pekerjaan perencanaan;
- b. membangun jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan, dan fasilitas tol;
- c. pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, termasuk memungut dan menggunakan uang tol;
- d. menggunakan ruang milik jalan tol untuk usaha lain yang berkaitan dengan pengoperasian jalan tol, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau:
- e. menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

# b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris	: Satya Heragandhi : Frans S. Sunito : Taruli M. Hutapea	Ir. Abdul Hadi Hs. Taruli M. Hutapea Frans S. Sunito
<b>Direksi</b> Direktur Utama Direktur	: Edwin Cahyadi : Sonhadji Surahman	Ir. Subakti Syukur Ir. Yauw Diaz Moreno

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 80 dan 11 orang (tidak diaudit).

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

# a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") dari Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI").

#### b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan" dalam penyusunan laporan keuangan.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan metode akrual kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

#### c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank serta deposito berjangka dengan waktu jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dan tidak dijaminkan.

# d. Saldo dan Transaksi dalam Mata Uang Asing

Transaksi selama periode dan tahun berjalan dalam mata uang selain Rupiah dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Rupiah dicatat dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kurs rata-rata Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing Rp13.436 dan Rp13.795 untuk AS\$1.

# e. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengakuan awal, dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya dan dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

# e. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line-method) untuk mengalokasikan harga perolehan hingga mencapai nilai residu sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

Jenis aset tetap	Masa Manfaat
Bangunan	20 tahun
Perlengkapan lalu lintas	5 - 10 tahun
Partisi dan perlengkapan kantor	3 - 5 tahun

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun terjadinya. sedangkan pemugaran dan penambahan dalam jumlah material dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dilepas, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari aset tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dilaporkan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Aset tetap dalam penyelesaian disajikan sebagai bagian dalam aset tetap dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian. Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

### f. Aset Takberwujud - Hak Pengusahaan Jalan Tol

Berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ("PPJT"), Perusahaan memiliki Hak Pengusahaan Jalan Tol ("HPJT") yang merupakan hak untuk membebankan pengguna jasa publik berdasarkan perjanjian jasa konsesi (Catatan 24a).

Perusahaan telah menerapkan ISAK No. 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" ("ISAK No. 16") dan ISAK No. 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" ("ISAK No .22").

ISAK No. 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK No. 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK No. 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

# f. Aset Takberwujud - Hak Pengusahaan Jalan Tol (lanjutan)

Perusahaan membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengusahaan jalan tol yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") tanpa syarat.

Perusahaan tidak dapat memindahkan/mengalihkan haknya berdasarkan PPJT, dan tidak dapat memindahkan/mengalihkan tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan PPJT tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemerintah, kecuali pengalihan dilakukan sebagai bentuk jaminan untuk pembayaran pinjaman.

Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/BPJT pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selama periode hak pengusahaan jalan tol, aset Hak Pengusahaan Jalan Tol dapat dikeluarkan dari laporan posisi keuangan Perusahaan jika jalan tol diserahkan (dikuasakan) kepada pihak lain atau Pemerintah mengubah status jalan tol menjadi jalan non tol atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Sebelum tanggal 1 Januari 2015, aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi yang dikurangi dengan masa pembangunan jalan tol, dengan menggunakan metode garis lurus.

Sejak tanggal 1 Januari 2015, aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- 1. Aset hak pengusahaan jalan tol untuk jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode unit pemakaian berdasarkan volume lalu lintas.
- 2. Aset hak pengusahaan jalan tol selain jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus.

Perubahan metode amortisasi ini diterapkan secara prospektif.

#### Provisi pelapisan jalan tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yaitu antara lain dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi pelapisan ulang jalan tol diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

# g. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset" dalam penyusunan laporan keuangannya. Penerapan PSAK revisi ini tidak memiliki dampak yang signifikan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan.

Perusahaan menilai pada setiap periode pelaporan tahunan indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas atau aset takberwujud yang belum dapat digunakan) diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan atas aset tersebut

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "rugi penurunan nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Jika tidak terdapat transaksi tersebut, model penilaian yang sesuai digunakan untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda (*valuation multiples*) atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset yang mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa masa manfaatnya.

#### h. Pajak Penghasilan

Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan" dalam penyusunan laporan keuangannya. Penerapan PSAK revisi ini tidak memiliki dampak yang signifikan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

# h. Pajak Penghasilan (lanjutan)

#### Pajak kini

Beban atau manfaat pajak penghasilan merupakan jumlah atau neto dari pajak penghasilan badan saat ini dan pajak tangguhan.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan dan tahun sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba operasi sebelum pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laba atau rugi karena penghasilan kena pajak tidak termasuk bagian dari pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun yang berbeda, dan juga tidak termasuk bagian-bagian yang tidak dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Jumlah tambahan pajak dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diakui sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

#### Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada akhir periode pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat penghasilan kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan dapat digunakan.

Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar penghasilan kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

# i. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dalam penyusunan laporan keuangannya. PSAK ini menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan. Penerapan PSAK revisi ini tidak memiliki dampak yang signifikan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan.

Perusahaan mengakui kewajiban atas program imbalan kerja karyawan sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Perusahaan melakukan pendanaan sehubungan dengan estimasi liabilitas tersebut. Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada periode berjalan. Biaya jasa lalu sebagai dampak perubahan asumsi aktuaria bagi karyawan aktif diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama sisa masa kerja rata-rata karyawan tersebut.

Imbalan kerja atas pemutusan hubungan kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja.

#### j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

#### Pendapatan Tol

Pendapatan tol dari hasil pengoperasian jalan tol dicatat pada saat penjualan karcis tol dan jasa telah diberikan.

# Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan dikapitalisasi selama tahap konstruksi. Setelah konstruksi selesai biaya pinjaman selanjutnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

#### Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).

# k. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Dalam kegiatan usaha normalnya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan syarat dan kondisi normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Perusahaan mengungkapkan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
  - i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan.
  - ii) Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan.
  - iii) Personil manajemen kunci Perusahaan atau induk Perusahaan.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i) Perusahaan lain dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama.
  - ii) Suatu Perusahaan adalah perusahaan asosiasi atau ventura bersama dari Perusahaan (atau dari perusahaan lain dalam kelompok usaha).

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

# k. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

- b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
  - iii) Kedua perusahaan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - iv) Satu perusahaan adalah ventura bersama dari perusahaan ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari perusahaan ketiga.
  - v) Perusahaan lain tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau perusahaan lain yang terkait dengan Perusahaan.
  - vi) Perusahaan yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a.
  - vii) Orang yang diidentifikasikan dalam huruf a) i) yang memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan atau merupakan personil manajemen kunci Perusahaan (atau entitas induk dari Perusahaan).

Entitas berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini didefinisikan dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

# I. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" dan PSAK No. 68 (Revisi 2013), "Pengukuran Nilai Wajar". Penerapan PSAK revisi ini tidak memiliki dampak yang signifikan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan.

# 1. Aset keuangan

#### Pengakuan awal

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian tersebut pada setiap akhir tahun buku.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

# I. Instrumen Keuangan (lanjutan)

- 1. Aset keuangan (lanjutan)
  - Pengakuan awal (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016, aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan setara kas, dana ditetapkan penggunaannya dan piutang lain-lain. Perusahaan telah menetapkan bahwa semua aset keuangan dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan tersedia untuk dijual dan investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

# Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

# 2. Liabilitas keuangan

#### Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman dan utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2016, liabilitas keuangan Perusahaan termasuk utang kontraktor dan konsultan, beban akrual, utang retensi, utang bank, liabilitas pembebasan tanah dan utang lain-lain. Perusahaan telah menetapkan bahwa semua liabilitas keuangan dikategorikan sebagai pinjaman dan utang. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas keuangan tersedia untuk dijual dan investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

# Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan mengunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

# I. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### 3. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

#### 4. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

# Risiko penyesuaian kredit

Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih dapat diobservasi untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak yang bertransaksi antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen ikut diperhitungkan.

# 5. Biaya perolehan diamortisasi atas instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

# 6. Penurunan nilai dari aset keuangan

Perusahaan melakukan evaluasi pada setiap tanggal laporan posisi keuangan apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

# Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan kelompok tersebut dinilai penurunan nilainya secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

# I. Instrumen Keuangan (lanjutan)

- 6. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)
  - Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut berkurang melalui penggunaan nilai penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistik dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Perusahaan. Jika, pada periode berikutnya, jumlah taksiran kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan untuk penurunan nilai. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laba rugi.

# 7. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

#### Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam suatu perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan secara substansial tidak mentransfer atau tidak menahan seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

#### Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masingmasing liabilitas diakui dalam laba rugi.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### m. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dimana ada kemungkinan besar bahwa untuk penyelesaian kewajiban tersebut diperlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik saat ini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan.

#### 3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING

Perusahaan membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

#### a. Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

# Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud - Hak Pengusahaan Jalan Tol

Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud - hak pengusahaan jalan tol berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis, perkembangan teknologi di masa depan dan masa konsesi.

Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

#### Penentuan Nilai Wajar dari Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian, termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan. Rincian lebih lanjut diungkapkan pada Catatan.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

# a. Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)

#### Amortisasi Hak Pengusahaan Jalan Tol

Efektif mulai tanggal 1 Januari 2015, manajemen Perusahaan memutuskan untuk mengganti metode amortisasi hak pengusahaan jalan tol - jalan dan jembatan dari metode garis lurus selama masa konsesi menjadi metode "*Pola konsumsi jalan tol yang diakibatkan oleh lalu lintas*" selama masa konsesi. Perubahan metode amortisasi ini diterapkan secara prospektif.

#### Provisi pelapisan jalan tol

Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini pada tanggal pelaporan.

#### b. Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

# Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK terkait dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan.

#### Pengakuan dan pengukuran Aset Takberwujud - Hak Pengusahaan Jalan Tol

Perusahaan mengakui aset takberwujud sejauh Perusahaan memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada Perusahaan akan ditentukan dengan mengacu pada syarat kontrak dan, jika ada, hukum kontrak yang relevan.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

	31 Desember 2016	<b>31 Desember 2015</b>
Kas:		
Kas kecil	11.500.000	11.500.000
Kas pengembalian	815.115.986	813.913.223
Kas di bank:		
Pihak berelasi:		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	23.760.881.605	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.332.527.105	62.040.951.656
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	154.050.439	-
Pihak ketiga - PT Bank Permata Tbk	1.386.187.093	5.380.621.991
Deposito berjangka Pihak ketiga -		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	5.000.000.000	12.500.000.000
Total kas dan setara kas	51.460.262.228	80.746.986.870

Bunga deposito berjangka dalam mata uang rupiah, dengan jangka waktu 1 - 3 bulan dan dengan tingkat suku bunga rata-rata sebesar 8,15% sampai dengan 9,00% pada 31 Desember 2016 dan 7,25% sampai dengan 10,25% pada tahun 2015.

# 5. PIUTANG LAIN-LAIN

Rincian piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pendapatan bagi hasil tol	44.745.984.886	-
Pendapatan tol E-Toll Card	1.632.199.725	1.520.195.793
Piutang dana dukungan Pemerintah untuk pembebasan tanah - <i>landcaping</i>	469.000.000	469.000.000
Lain-lain	177.223.044	154.740.650
Total	47.024.407.655	2.143.936.443

Pendapatan bagi hasil tol merupakan bagi hasil pendapatan atas kenaikan tarif dari periode 1 Januari 2015 sampai 30 September 2016 dari 9.97% menjadi 14.42% atas kendaraan yang melewati ruas tol Lingkar Luar Jakarta ("JORR") pada Januari sampai September 2016 yang belum dibayarkan oleh PT Jalantol Lingkarluar Jakarta ("PT JLJ") dan PT Hutama Karya (Persero) kepada Perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Pendapatan tol *E-Toll Card* merupakan bagi hasil pendapatan tol *E-Toll Card* atas kendaraan yang melewati ruas tol Lingkar Luar Jakarta ("JORR") pada Desember 2016 yang belum dibayarkan oleh PT Jalantol Lingkarluar Jakarta ("PT JLJ"), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Piutang dana dukungan Pemerintah untuk pembebasan tanah merupakan penerimaan yang akan diterima dari pembayaran tanah (*Landcaping*) yang masih akan diterima pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 5. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Berdasarkan Amandemen I Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara sesuai Akta Notaris No. 24 tanggal 18 November 2011 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, ditetapkan bahwa dalam hal realisasi Pengadaan tanah melebihi batasan kewajiban Biaya Pengadaan Tanah, Perusahaan memperoleh dana dukungan Pemerintah dengan jumlah maksimum sebesar Rp387.643.000.000.

Sesuai Perjanjian Pemberian Dukungan Pemerintah No. 05/KU.08.01/PPDP/DDPPTJT/III/2012 tanggal 21 Maret 2012, Perusahaan membiayai terlebih dahulu kenaikan harga tanah yang menjadi tanggungan Pemerintah dan mengajukan permohonan penggantian dana (*reimbursement*) kepada Pemerintah.

Pada bulan Desember 2013, Perusahaan telah membiayai terlebih dahulu kenaikan harga tanah sebesar Rp123.900.315.936 dan hingga tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan telah melakukan reimburse kepada Pemerintah sebesar Rp122.325.234.169. Pada tahun 2015, Perusahaan melakukan reimburse kepada Pemerintah sebesar Rp1.106.081.767, sehingga pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masih terdapat sisa yang belum di-reimburse sebesar Rp469.000.000.

#### 6. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari uang muka dan biaya dibayar di muka yang dibayar oleh Perusahaan sehubungan dengan biaya listrik, bahan bakar, perlengkapan kantor, kegiatan sosial dan sebagainya.

# 7. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

#### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Bangunan	5.177.694.145	744.681.819	-	5.922.375.964
Perlengkapan lalu lintas	1.802.673.400	9.262.213.885	-	11.064.887.285
Partisi dan perlengkapan kantor	1.226.556.065	203.345.500	-	1.429.901.565
Aset dalam penyelesaian	309.845.993	8.690.476.708	309.845.993	8.690.476.708
Total Harga Perolehan	8.516.769.603	18.900.717.912	309.845.993	27.107.641.522
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	-	264.336.804	-	264.336.804
Perlengkapan lalu lintas	14.061.520	568.602.165	=	582.663.685
Partisi dan perlengkapan kantor	1.143.508.072	93.833.645	=	1.237.341.717
Total Akumulasi Penyusutan	1.157.569.592	926.772.614		2.084.342.206
Nilai Buku - Bersih	7.359.200.011			25.023.299.316

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 7. ASET TETAP (lanjutan)

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.243.121.808	=	16.565.743	1.226.556.065
-	5.177.694.145	-	5.177.694.145
_	1.802.673.400	=	1.802.673.400
-	309.845.993	-	309.845.993
1.243.121.808	7.290.213.538	16.565.743	8.516.769.603
944.372.065	199.136.007	-	1.143.508.072
=	14.061.520	-	14.061.520
944.372.065	213.197.527	-	1.157.569.592
298.749.743			7.359.200.011
	1.243.121.808 	1.243.121.808 - 5.177.694.145 - 1.802.673.400 - 309.845.993  1.243.121.808 7.290.213.538  944.372.065 199.136.007 - 14.061.520  944.372.065 213.197.527	1.243.121.808 - 16.565.743 - 5.177.694.145 1.802.673.400 309.845.993 -  1.243.121.808 7.290.213.538 16.565.743  944.372.065 199.136.007 14.061.520 -  944.372.065 213.197.527 -

# 8. ASET TAKBERWUJUD - HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1 007 026 551 544			1.997.936.551.544
1.997.930.331.344			1.997.930.331.344
1.997.936.551.544	-	-	1.997.936.551.544
128.128.249.451	66.492.710.333		194.620.959.784
128.128.249.451	66.492.710.333	-	194.620.959.784
1.869.808.302.093			1.803.315.591.760
	1.997.936.551.544 1.997.936.551.544 128.128.249.451 128.128.249.451	1.997.936.551.544 - 1.997.936.551.544 -  1.28.128.249.451 66.492.710.333  128.128.249.451 66.492.710.333	1.997.936.551.544

#### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.997.936.551.544			1.997.936.551.544
1.997.936.551.544		-	1.997.936.551.544
62.198.688.618	65.929.560.833	-	128.128.249.451
62.198.688.618	65.929.560.833		128.128.249.451
1.935.737.862.926			1.869.808.302.093
	1.997.936.551.544 1.997.936.551.544 62.198.688.618 62.198.688.618	1.997.936.551.544       -         1.997.936.551.544       -         62.198.688.618       65.929.560.833         62.198.688.618       65.929.560.833	1.997.936.551.544

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 9. UANG MUKA KONTRAKTOR

Uang muka kontraktor merupakan uang muka yang dibayarkan kepada PT Mangun Karya Mandiri untuk pembangunan gardu tol Meruya Utama 3. Sampai dengan 31 Desember 2016, saldo uang muka kontraktor adalah sebesar Rp1.377.693.845.

# 10. UTANG KONTRAKTOR DAN KONSULTAN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PT Mangun Karya Mandiri	4.445.550.981	-
PT Mahardika Jaya Utama	1.935.640.000	-
PT Sekar Hati Jaya Maju	681.814.000	1.721.740.633
PT Tata Guna	552.744.942	552.744.942
PT Multhi Phi Beta	215.533.500	215.533.500
PT Duta Anugerah Mandiri	250.293.000	-
PT Bramanty Adhikari Tibra Syandana	282.160.000	-
PT Seecon	163.927.558	-
PT Sarana Multi Daya	151.800.000	-
PT Perencana Jaya	107.000.000	-
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	-	2.319.384.000
PT Yodya Karya	-	767.800.000
Lembaga Teknologi FTUI	-	630.545.200
PT Panca Tunggal	-	243.755.993
Lain-lain	311.703.200	368.215.758
Total	9.098.167.181	6.819.720.026

#### 11. UTANG LAIN-LAIN

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Utang rekanan	5.416.812.176	4.471.494.301
Uang titipan	3.481.467.901	5.315.788.068
Pendapatan iklan diterima di muka	121.755.683	-
Lain-lain	49.995.000	-
Total utang lain-lain	9.070.030.760	9.787.282.369

Utang rekanan merupakan utang atas konsultan, sewa, pembelian alat K3, pembelian peralatan kantor dan lain-lain.

Uang titipan merupakan pendapatan tol *E-Toll Card* yang belum dibayarkan kepada PT Jalantol Lingkarluar Jakarta dan PT Jasa Marga Cabang Jakarta Tangerang atas kendaraan yang melewati ruas tol Perusahaan.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 12. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pajak penghasilan:		
Pasal 4 (2)	110.227.555	20.442.771
Pasal 21	69.499.998	66.933.009
Pasal 22	2.300.161	2.583.438
Pasal 23	49.377.110	9.877.853
Pajak Bumi dan Bangunan	-	2.574.627.600
Total utang pajak	231.404.824	2.674.464.671

b. Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

	2016	2015
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	48.417.511.577	(79.602.563.130)
Beda temporer:		
Amortisasi HPJT	(50.447.252.175)	(53.942.821.298)
Penyusutan aset tetap	(1.767.050.125)	82.212.043
Imbalan kerja	875.980.064	171.120.636
Biaya provisi untuk overlay	16.575.000.000	-
Beda tetap:	(4.400.447.040)	(0.057.744.550)
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	(1.190.417.910)	(3.257.744.559)
Laba (rugi) fiskal	12.463.771.431	(136.549.796.308)
Akumulasi rugi fiskal:		
	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Tahun 2016	12.463.771.431	
Tahun 2015	(136.549.796.308)	(136.549.796.308)
Tahun 2014	(154.078.474.236)	(154.078.474.236)
Tahun 2013	(7.610.560.472)	(7.610.560.472)
Tahun 2012	(5.335.192.961)	(5.335.192.961)
Tahun 2011	-	(4.120.484.051)
Total akumulasi rugi fiskal	(201 110 252 546)	(207 CO4 E09 029)
	(291.110.252.546)	(307.694.508.028)

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dikompensasikan selama periode 5 tahun dari setiap tahun kerugian fiskal tersebut terjadi. Perusahaan menyerahkan Surat Pemberitahuan dengan sistem *self-assessment*. Otoritas perpajakan dapat memeriksa Perusahaan dalam 5 tahun dari tanggal pajak tersebut terhutang.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 12. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2016	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Diakui di penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2016
Amortisasi HPJT	(20.795.307.766)	(12.611.813.044)	-	(33.407.120.810)
Penyusutan aset tetap	(4.143.998) 129.194.091	(441.762.531) 218.995.016	36.751.843	(445.906.529) 384.940.950
Imbalan kerja Kompensasi rugi fiskal	29.874.849.865	26.158.079.482	36.751.843	56.032.929.347
Provisi overlay	29.074.049.005	4.143.750.000	-	4.143.750.000
1 Tovior overlay		4.140.700.000		
Aset pajak tangguhan, bersih	9.204.592.192	17.467.248.923	36.751.843	26.708.592.958
	1 Januari 2015	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Diakui di penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2015
Amortisasi HPJT	(9.300.346.019)	(13.485.705.324)		(22.786.051.343)
Penyusutan aset tetap	517.577.875	20.553.011	_	538.130.886
Imbalan kerja	146.813.294	42.780.159	(60.399.362)	129.194.091
Kompensasi rugi fiskal	-	29.874.849.865	· -	29.874.849.865
Penyesuaian pajak tangguhan		1.448.468.693		1.448.468.693
Aset (liabilitas) pajak tangguhan, bersih	(8.635.954.850)	17.900.946.404	(60.399.362)	9.204.592.192

d. Rekonsiliasi antara manfaat pajak penghasilan yang tercermin di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan jumlah teoritis pajak pada rugi sebelum pajak penghasilan Perusahaan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

# Tahun yang berakhir pada tanggal

	2016	2015
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	48.417.511.577	(79.602.563.130)
Jumlah teoritis beban pajak penghasilan dihitung dengan tarif 25%	(12.104.377.894)	19.900.640.783
Efek pajak penghasilan pada beda tetap: Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final Aset pajak tangguhan yang tidak diakui atas	297.604.478	814.436.140
estimasi rugi fiskal untuk tahun berjalan Penyesuaian pajak tangguhan	29.274.022.340	(4.262.599.212) 1.448.468.693
Manfaat pajak penghasilan tangguhan, bersih	17.467.248.924	17.900.946.404

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 13. UTANG RETENSI

Utang retensi merupakan utang atas pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Tol Ruas Lingkar Jakarta (JORR) W2 Utara dan bangunan pelengkap gedung kantor. Retensi ditahan Perusahaan selama 1 tahun sejak pekerjaan konstruksi selesai dan diserahterimakan. Rincian utang retensi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pihak berelasi:		
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	12.780.565.784
Pihak ketiga:		
PT Pancatunggal Karsasejati	340.188.029	-
PT Mangun Karya	158.350.064	-
PT Sekar Hati Jaya Maju	19.985	305.255.601
PT Module Intracs	10.000	999.569.250
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	90.854	24.987.246.537
Lain-lain	238.014.605	42.184.560
Total utang retensi	736.673.537	39.114.821.732
Dikurangi: Saldo jatuh tempo dalam satu tahun	(736.673.537)	(39.114.821.732)
Total utang retensi yang jatuh tempo lebih dari satu tahun		

# 14. LIABILITAS PEMBEBASAN TANAH

Liabilitas pembebasan tanah berasal dari dana talangan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara yang menggunakan dana talangan Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT) (Catatan 22). Nilai tambah dan ketentuan pembayaran dana talangan tersebut dijabarkan lebih rinci dalam Catatan 24b. Pada tanggal 31 Desember 2016, liabilitas pembebasan tanah telah dibayar lunas oleh Perusahaan.

# 15. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Beban bunga		
Nilai tambah atas pinjaman BLU-BPJT	-	14.130.288.823
Kredit investasi	2.699.053.899	2.765.363.043
Pinjaman bunga selama konstruksi	333.913.583	438.711.180
Beban operasional tanah	3.626.884.600	4.011.334.600
Lain-lain	79.950.100	92.983.100
Total	6.739.802.182	21.438.680.746

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 16. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Sejak tahun 2014, Perusahaan telah menghitung liabilitasnya sehubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program imbalan kerja tersebut.

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8%	8%
Tingka diskonto per tahun	7%	9,00%
Tabel mortalita	TM III	TM III 2011
Tingkat cacat tetap per tahun	0,02%	0,02%
Tingkat pengunduran diri sukarela	1% pada usia 40 tahun	1% pada usia 40 tahun
	dan berkurang secara linear sampai 0%	dan berkurang secara linear sampai 0%
	pada usia 55 tahun	pada usia 55 tahun

Estimasi liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2016 adalah berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaria independen.

Rincian beban yang diakui di tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2016	2015	
Biaya jasa kini	710.003.972	119.466.219	
Biaya jasa lalu	119.466.219	-	
Beban bunga	46.509.871	51.654.417	
Total beban yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	875.980.062	171.120.636	

Mutasi keuntungan (kerugian) aktuaria yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Tahun yang berakhir pada tanggal

	2016	2015
Saldo awal tahun	181.198.086	-
Keuntungan (kerugian) aktuaria	(147.007.372)	241.597.448
Efek pajak - manfaat (beban) pajak tangguhan	36.751.843	(60.399.362)
Penghasilan komprehensif lain di akhir tahun, bersih	70.942.557	181.198.086

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 16. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Rincian liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja Keuntungan aktuaria yang belum diakui	1.539.763.799	516.776.365
Liabilitas imbalan kerja akhir tahun	1.539.763.799	516.776.365

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

	2016	2015
Saldo awal periode	516.776.365	587.253.177
Beban yang diakui	875.980.062	171.120.636
Kerugian (keuntungan) aktuaria	147.007.372	(241.597.448)
Saldo akhir tahun	1.539.763.799	516.776.365

Penyesuaian terhadap liabilitas untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja	1.539.763.799	516.776.365
Penyesuaian atas kewajiban imbalan pasca kerja	-	_

# 17.

UTANG BANK		
	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Kredit Investasi Pihak berelasi - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pihak ketiga - PT Bank DKI Jakarta	1.150.519.101.631 122.921.068.550	1.029.616.016.898 110.001.711.207
Sub-total	1.273.440.170.181	1.139.617.728.105
Pinjaman Bunga Selama Konstruksi (IDC) Pihak berelasi - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pihak ketiga - PT Bank DKI Jakarta	127.025.413.362 13.569.779.643	137.867.413.362 14.727.779.644
Sub-total	140.595.193.005	152.595.193.006
Total	1.414.035.363.186	1.292.212.921.111
Penyesuaian atas nilai wajar pinjaman Dikurangi: Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(1.932.365.051) (126.000.000.000)	(97.000.000.000)
Total bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	1.286.102.998.135	1.195.212.921.111

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 17. UTANG BANK (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi antara Perusahaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank DKI Jakarta yang diaktakan dalam Akta No. 13 tanggal 13 Oktober 2011 oleh notaris Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit sindikasi dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp1.554.000.000.000 dengan jangka waktu maksimum 15 tahun atau sampai dengan tahun 2025. Perusahaan dikenakan biaya provisi sebesar 0,25% atau Rp3.885.000.000 yang dibayar secara bertahap sebesar 50% pada saat penandatanganan perjanjian dan 50% pada saat penarikan kredit pertama kali. Atas fasilitas pinjaman ini Perusahaan dikenakan pembebanan:

- Suku bunga tetap (fixed rate) selama 1 tahun sebesar 10% per tahun.
- Setelah pengenaan suku bunga tetap selama 1 tahun, Perusahaan diwajibkan membayar bunga dengan tingkat suku bunga sebesar Acuan Suku Bunga ditambah marjin 4% per tahun. Acuan Suku Bunga yang dimaksud merupakan suku bunga deposito periode 3 bulanan Bank Mandiri yang dipublikasikan 2 hari kerja sebelum periode berlakunya suku bunga.

Perusahaan wajib menjaga *financial covenant* yang tercermin di dalam laporan keuangan, yaitu minimal *Debt to Equity Ratio* mencerminkan rasio pembiayaan dari kreditur dengan *self financing* yaitu sebesar 70:30 untuk Kredit Investasi dan menjaga *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) lebih besar satu kali. Terkait dengan DSCR tersebut, berdasarkan Akta No. 14 tanggal 13 Oktober 2011 oleh notaris Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan diwajibkan membuka Rekening Cadangan Pembayaran Utang untuk menampung dana cadangan pembayaran angsuran dan bunga utang bank sebesar 1 kali pembayaran angsuran dan 1 kali pembayaran bunga. Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo di rekening tersebut adalah sebesar Rp59.782.499.653. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan memenuhi kedua *financial covenant* yang diwajibkan.

Pada tanggal 25 Maret 2015, Perusahaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank DKI Jakarta melakukan amandemen I atas Perjanjian Kredit Sindikasi tersebut untuk memperpanjang masa penarikan Kredit Investasi sampai dengan tanggal 29 Februari 2016.

Pada tanggal 27 Desember 2016, Perusahaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank DKI Jakarta melakukan amandemen II atas Perjanjian Kredit Sindikasi tersebut untuk memperpanjang masa penarikan Kredit Investasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Selain itu, terdapat perubahan atas marjin dari yang semula Acuan Suku Bunga ditambah marjin 4% per tahun menjadi Acuan Suku Bunga ditambah marjin 3,5% per tahun, perubahan suku bunga berlaku efektif sejak tanggal 23 Oktober 2016.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 18. MODAL SAHAM

Rincian kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

20	1	6

Pemegang Saham	Kepemilikan Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Total Rp
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	426.222.550	65%	426.222.550.000
PT Jakarta Marga Jaya	229.504.450	35%	229.504.450.000
Total	655.727.000	100%	655.727.000.000

#### 2015

Pemegang Saham	Kepemilikan Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Total Rp
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	372.922.550	65%	372.922.550.000
PT Jakarta Marga Jaya	200.804.450	35%	200.804.450.000
Total	573.727.000	100%	573.727.000.000

Berdasarkan akta notaris Tatyana Indrati Hasjim, S.H. No. 3 tanggal 7 Agustus 2014, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp162.700.000.000 yang semula Rp411.027.000.000 menjadi Rp573.727.000.000.

Berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Perusahaan di luar Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 20 Desember 2016 para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor ke dalam Perusahaan dari semula sebesar Rp573.727.000.000 atau sebanyak 573.727.000 lembar saham menjadi sebesar Rp655.727.000.000 atau sebanyak 655.727.000 lembar saham. Seluruh Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor tersebut diatas yang telah diaktakan oleh Tatyana Indrati Hasjim, S.H. dengan Akta No. 14 tanggal 22 Desember 2016 tersebut diatas telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor: AHU-0024998.AH.01.02 tanggal 23 Desember 2016.

### 19. PENDAPATAN TOL

Merupakan pendapatan tol atas pengoperasian ruas Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara (Ulujami - Kebon Jeruk).

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 20. BEBAN USAHA

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

	2016	2015
Amortisasi dan penyusutan	67.068.789.938	65.968.712.241
Provisi pelapisan jalan tol	16.575.000.000	-
Gaji dan tunjangan	13.496.706.581	10.466.337.134
Bahan bakar, listrik dan air	3.245.126.745	3.666.735.487
Perbaikan dan pemeliharaan aset	2.664.076.447	1.880.696.828
Jasa penjemputan hasil tol	2.517.645.717	2.148.386.801
Pelayanan pemakai jalan tol	1.393.347.265	1.571.328.496
Survei lalu lintas	1.379.454.994	-
Pembersihan jalan dan pertamanan	1.301.474.423	1.550.892.046
Sewa kendaraan dan peralatan tol	1.189.759.523	1.380.156.250
Lainnya	4.684.625.261	3.285.030.473
Total	115.516.006.894	91.918.275.756

# 21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

# Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2016	2015
7.296.942.434	6.029.830.642
5.874.029.715	5.874.029.715
1.741.455.524	1.742.230.640
922.369.249	1.029.777.500
335.289.732	445.531.195
350.693.010	190.611.862
1.976.746.642	1.250.707.147
18.497.526.306	16.562.718.701
	5.874.029.715 1.741.455.524 922.369.249 335.289.732 350.693.010 1.976.746.642

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 22. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

a. Saldo akun dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

			Persentase Ter	hadap Total Aset
	31 Desember 2016 Rp	31 Desember 2015 Rp	31 Desember 2016 %	31 Desember 2015 %
Kas dan setara kas - bank			<del></del>	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.332.527.105	62.040.951.656	1,01%	3,10%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	154.050.439	-	0.01%	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	23.760.881.605	-	1,18%	-
Dana ditetapkan penggunaannya				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	59.782.499.653	32.978.551.584	2,97%	1,65%
Piutang lain-lain				
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	37.790.300.165	1.520.195.793	1,87%	0,08%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	222.120.809	-	0,01%	-
PT Hutama Karya (Persero)	8.531.018.044	-	0,42%	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11.968.637	-	0,00%	-
Total	150.585.366.457	96.539.699.033	7,47%	4,83%
	31 Desember 2016 Rp	31 Desember 2015 Rp	Persentase Terha 31 Desember 2016 %	31 Desember 2015
Liabilitas pembebasan tanah Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol		218.272.714.548		13,72%
Utang retensi PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	12.780.565.784	-	0,80%
Utang lain-lain				
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	3.262.984.593	5.315.788.068	0,22%	0,33%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	842.232.000	590.349.375	0,06%	0,04%
Utang bank:				
Kredit sindikasi				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.150.519.101.631	1.029.616.016.898	79,01%	64,72%
Pinjaman IDC				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	127.025.413.362	137.867.413.362	8,72%	8,67%
Total	1.281.649.731.586	1.404.442.848.035	88.01%	88,28%

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp643.407.000 dan Rp1.254.804.000.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 22. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pemegang Saham	Piutang lain-lain
PT Hutama Karya (Persero)	BUMN	Piutang lain-lain
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	Berelasi	Uang titipan
	Merupakan Badan/Instansi yang tendalikan, dikendalikan bersama atau pengaruhi signifikan oleh Pemerintah	Liabilitas pembebasan tanah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BUMN	Simpanan Bank, Kredit Sindikasi Piutang lain-lain, Pinjaman IDC
PT Bank Rakyat Indonesia (Perse	ro) Tbk BUMN	Simpanan Bank
PT Bank Negara Indonesia (Perse	ro) Tbk BUMN	Simpanan Bank Piutang lain-lain
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	BUMN	Uang Muka Kontraktor, Utang Kontraktor dan Utang Retensi

# 23. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga sama dengan taksiran nilai wajar, dari instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan posisi keuangan:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Aset Keuangan		
Aset Keuangan Lancar		
Kas dan setara kas	51.460.262.228	80.746.986.870
Piutang lain-lain	47.024.407.655	2.143.936.443
Total Aset Keuangan Lancar	98.484.669.883	82.890.923.313
Aset Keuangan Tidak Lancar Dana ditetapkan penggunaannya	59.782.499.653	32.978.551.584
Total Aset Keuangan	158.267.169.536	115.869.474.897

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 23. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Liabilitas Keuangan		
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek		
Utang kontraktor dan konsultan	9.098.167.181	6.819.720.026
Utang bank	126.000.000.000	97.000.000.000
Utang retensi	736.673.537	39.114.821.732
Beban akrual	6.739.802.182	21.438.680.746
Liabilitas pembebasan tanah	-	218.272.714.548
Utang lain-lain	9.070.030.760	9.787.282.369
Total Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	151.644.673.660	392.433.219.421
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang		
Utang bank	1.286.102.998.135	1.195.212.921.111
Total Liabilitas Keuangan	1.437.747.671.795	1.587.646.140.532

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang mana dapat digunakan untuk memperkirakan nilai tersebut:

### Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek diasumsikan sama dengan niai tercatatnya karena akan jatuh tempo dalam waktu singkat.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan Perusahaan mendekati nilai wajarnya.

# Liabilitas keuangan jangka panjang

Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif berdasarkan tingkat suku bunga terakhir yang berlaku di pasar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga mengambang yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 23. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

# a. Kebijakan Manajemen Risiko

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko likuiditas. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia.

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa debitur tidak membayar semua atau sebagian pinjaman atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perusahaan.
- Risiko likuiditas: Perusahaan menetapkan risiko kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas yang terkait dengan liabilitas keuangan
- Risiko pasar: pada saat ini tidak terdapat risiko pasar, selain risiko suku bunga dan risiko nilai tukar karena Perusahaan tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam usaha.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi; dan
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

# (i) Risiko Kredit

Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank, yaitu hanya bank-bank ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

# (ii) Risiko Likuiditas

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan bank yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

# (iii) Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, Perusahaan mengupayakan penggunaan mata uang domestik dalam melakukan transaksi.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 23. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

# a. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

# (iv) Risiko Suku Bunga

Perusahaan tidak memiliki risiko tingkat suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Perusahaan akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Perusahaan akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan pemberi pinjaman atau mempertimbangkan strategi *hedging* suku bunga. Perusahaan tidak memiliki pinjaman dan aktivitas *hedging* tingkat bunga untuk mengantisipasi risiko tingkat suku bunga tersebut.

#### b. Manajemen Permodalan

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha sehingga dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya dan memelihara struktur permodalan yang optimum.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

### 24. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

#### a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

- Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengenai pengalihan Perjanjian Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara: Ulujami Kebun Jeruk dari Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 257/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Entitas Induk), berdasarkan Akta No. 05 tanggal 6 Mei 2010 dari Notaris Rina Utami Djauhari, SH. Masa Konsesi Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara selama 40 (empat puluh) tahun sejak tanggal penandatanganan PPJT 1 Januari 2005 atau berakhir pada tanggal 31 Desember 2044.
- Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengenai Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara berdasarkan Akta No. 7 tanggal 6 Mei 2010 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H.
- Amandemen I Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara berdasarkan Akta No.8 tanggal 7 Januari 2011 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H. mengenai perubahan terhadap beberapa hal yang dimuat dalam PPJT.
- Perusahaan mengadakan perjanjian ulang dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengenai Perjanjian Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara: Ulujami - Kebun Jeruk berdasarkan Akta No. 03 tanggal 7 Juni 2011 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 24. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

- a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (lanjutan)
  - Amandemen I Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara berdasarkan Akta No.24 tanggal 18 Nopember 2011 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H. mengenai perubahan terhadap beberapa hal yang dimuat dalam PPJT.
  - Amandemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara berdasarkan Akta No.22 tanggal 24 Desember 2013 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H. mengenai perubahan terhadap beberapa hal yang dimuat dalam PPJT.
- b. Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT)
  - Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT) mengenai pengalihan perjanjian layanan dana bergulir untuk penggantian pembelian tanah dalam rangka pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara, berdasarkan Akta No. 8 tanggal 28 Juli 2009, dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H. Perjanjian pengalihan tersebut telah diaktakan dengan Akta No. 6 tanggal 6 Mei 2010 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H. Jumlah dana bergulir untuk penggantian pembelian tanah tersebut adalah sebesar Rp610.170.000.000 dengan jangka waktu pinjaman adalah maksimum sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah, namun tidak lebih dari tanggal 18 Oktober 2009. Atas pinjaman ini dikenakan biaya provisi sebesar 1% dari nilai pinjaman atau sebesar Rp6.101.700.000 dibayarkan secara 2 tahap masing-masing sebesar 0,5% atau Rp3.050.850.000.

Perusahaan wajib mengganti dana yang merupakan dana bergulir yang telah dipergunakan untuk pembelian tanah 1 (satu) seksi berikut nilai tambahnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penyelesaian pembebasan tanah 1 (satu) seksi tersebut termasuk tagihan penggantian dananya dari BLU-BPJT.

Perusahaan mengakui utang atas penggunaan Layanan Dana Bergulir dengan perjanjian pengakuan utang yang diaktakan dengan Akta No 9 tanggal 6 Mei 2010 oleh notaris Rina Utami Djauhari, S.H.

- Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 6 Mei 2010 mengenai Amandemen I Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk penggatian pembelian tanah dalam rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., jangka waktu pinjaman adalah maksimum sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah, namun tidak lebih dari bulan Desember 2010.
- Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 6 Mei 2010 yang disalin kembali dengan Akta No. 8 tanggal 7 Januari 2011 mengenai Amandemen I Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk penggatian pembelian tanah dalam rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., jangka waktu pengadaan tanah akan dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan tentang Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara No. BA.06/BPJT/KE/HK.02.03/2011 tanggal 5 Mei 2011.
- Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 7 Januari 2011 mengenai Amandemen II Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk penggantian pembelian tanah dalam rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., jangka waktu pinjaman adalah maksimum sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah, namun tidak lebih dari bulan Desember 2011.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 24. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

- b. Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT) (lanjutan)
  - Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 13 Januari 2012 mengenai Amandemen III Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk penggantian pembelian tanah dalam rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara dari Notaris Trie Sulistiowarni, S.H., pembagian 2 Seksi atas pembayaran ganti rugi atau penggantian pembelian tanah untuk kepentingan pembangunan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara yaitu Seksi 1 (Kebon Jeruk Joglo) dan Seksi 2 (Joglo Ulujami) dengan jumlah pinjaman masingmasing sebesar Rp117.791.000.000 dan Rp492.379.000.000.
  - Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 27 Juni 2012 mengenai Amandemen IV Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk penggantian pembelian tanah dalam rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara dari Notaris Trie Sulistiowarni, S.H., jangka waktu pinjaman adalah maksimum sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah, namun tidak lebih dari bulan Desember 2012.
  - Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 Pebruari 2013 mengenai Amandemen V Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk penggantian pembelian tanah dalam rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara dari Notaris Trie Sulistiowarni, S.H., jangka waktu pinjaman adalah maksimum sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah, namun tidak lebih dari bulan Desember 2013.

#### c. Perjanjian dengan Kontraktor

	Kontraktor	Jarak Km	Progress Pembangunan	Nilai Kontrak Rp
Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara Seksi I Paket 1 (Kebon Jeruk - Meruya Selatan) Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1,95	100.00%	280.282.192.484
Seksi I Paket 2 (Meruya Selatan - Joglo Raya) Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1,5	100.00%	155.563.001.782
Seksi II Paket 3 (Joglo - Ciledug)  Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2,35	100.00%	195.478.746.984
Seksi II Paket 4.1 (Ciledug - Ulujami)	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk		100.00%	18.411.325.000
Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara Seksi II Paket 4.2 (Ciledug - Ulujami)	PT Jaya Konstruksi Manggala	2,07		
condition and the (choosing chajann)	Pratama Tbk		100.00%	246.252.325.000

• Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan antara Perusahaan dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 001/KONTRAK-DIR/MLJ/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara Seksi I Paket 1: Kebon Jeruk - Ulujami, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk berkewajiban menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak (termasuk PPN 10%) dengan masa berlaku terhitung sejak saat tanda tangan kontrak sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 457 hari kalender sejak tanggal mulai kerja atau 8 Maret 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) 505/AA/MLJ/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011. Selain itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk juga berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan selama 365 hari kalender sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Sementara Pertama (PHO-I) dan masa performa selama 730 hari kalender sejak diterbikannya Berita Acara Serah Terima Sementara Pertama (PHO-II).

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 24. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

- c. Perjanjian dengan Kontraktor (lanjutan)
  - Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan antara Perusahaan dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 001/KONTRAK-DIR/MLJ/XI/2011 tanggal 6 Desember 2012 mengenai Amandemen I Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara Seksi I Paket 1: Kebon Jeruk Joglo, nilai kontrak jasa pemborongan diubah menjadi Rp199.381.105.494 dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 550 hari kalender sejak tanggal mulai kerja atau 9 Juni 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 505/AA/MLJ/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011.
  - Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan antara Perusahaan dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 001/KONTRAK-DIR/MLJ/XI/2011 tanggal 6 Desember 2012, Addendum ke 7 tanggal 21 Oktober 2013 Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara Seksi I Paket 1: Kebon Jeruk Joglo, nilai kontrak jasa pemborongan diubah menjadi Rp280.282.192.000 dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 725 hari kalender sejak tanggal mulai kerja atau 9 Juni 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 505/AA/MLJ/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011.
  - Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan antara Perusahaan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk No. 001/KONTRAK-DIR/MLJ/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara Seksi I Paket 2: Kebon Jeruk Joglo, PT Adhi Karya (Persero) Tbk berkewajiban menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak (termasuk PPN 10%) dengan masa berlaku terhitung sejak saat tanda tangan kontrak sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 457 hari kalender sejak tanggal mulai kerja atau 12 April 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) 015/AA/MLJ/I/2012 tanggal 11 Januari 2012. Selain itu, PT Adhi Karya (Persero) Tbk juga berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan selama 365 hari kalender sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Sementara Pertama (PHO-I) dan masa performa selama 730 hari kalender sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Sementara Kedua (PHO-II).
  - Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan antara Perusahaan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk No. 001/KONTRAK-DIR/MLJ/II/2012 tanggal 20 Juli 2012 mengenai Amandemen I Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara Seksi I Paket 2: Kebon Jeruk - Joglo, nilai kontrak jasa pemborongan diubah menjadi Rp132.929.774.163.
  - Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan antara Perusahaan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk No. 001/KONTRAK-DIR/MLJ/II/2012 tanggal 20 Juli 2012, Addendum ke 6 tanggal 26 November 2013 Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara Seksi I Paket 2: Kebon Jeruk - Joglo, nilai kontrak jasa pemborongan diubah menjadi Rp152.284.381.000.

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 24. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

- c. Perjanjian dengan Kontraktor (lanjutan)
  - Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan antara Perusahaan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk No. 002/KONTRAK-DIR/MLJ/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara Seksi II Paket 3: Joglo Ulujami, PT Waskita Karya (Persero) Tbk berkewajiban menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak (termasuk PPN 10%) dengan masa berlaku terhitung sejak saat tanda tangan kontrak sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 457 hari kalender sejak tanggal mulai kerja atau 24 Juli 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 218/AA/MLJ/IV/2012 tanggal 23 April 2012. Selain itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk juga berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan selama 365 hari kalender sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Sementara Pertama (PHO-I) dan masa performa selama 730 hari kalender sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Sementara Kedua (PHO-II).
  - Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan antara Perusahaan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk No. 054/AA-SI/MLJ/VII/2012 tanggal 12 Juni 2012 mengenai Amandemen I Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara Seksi II Paket 3: Joglo - Ulujami, nilai kontrak jasa pemborongan diubah menjadi sebesar Rp175.790.656.886.
  - Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan antara Perusahaan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk No. 054/AA-SI/MLJ/VII/2012 tanggal 12 Juni 2012, Addendum ke 3 tanggal 27 Desember 2013 Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara Seksi II Paket 3: Joglo Ulujami, nilai kontrak jasa pemborongan diubah menjadi sebesar Rp195.478.746.000.
  - Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan antara Perusahaan dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk No. 035/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2011 tanggal 25 Mei 2012 tentang Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara Seksi II Paket 4: Joglo Ulujami, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk berkewajiban menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak (termasuk PPN 10%) dengan masa berlaku terhitung sejak saat tanda tangan kontrak sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 457 hari kalender sejak tanggal mulai kerja atau 8 September 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 308/AA/MLJ/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012.

Selain itu, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk juga berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan selama 365 hari kalender sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Sementara Pertama (PHO-I) dan masa performa selama 730 hari kalender sejak diterbikannya Berita Acara Serah Terima Sementara Kedua (PHO-II).

Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan antara Perusahaan dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk No. 035/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2011 tanggal 25 Mei 2012 tentang Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara Seksi II Paket 4: Joglo - Ulujami, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, Addendum ke 3 tanggal 1 Agustus 2013 Nilai Rp192.725.740.000. (paket 4.1 sebesar Rp18.411.325.000 dan paket 4.2 sebesar Rp174.314.415.000).

Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

# 24. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

- d. Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Peralatan Tol
  - Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan antara Perusahaan dengan PT Module Intracs Yasatama No. 060/KONTRAK-DIR/MLJ/X/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Kontrak Jasa Pemborongan Pekeriaan Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Peralatan Tol pada Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara: Kebon Jeruk – Ulujami, dengan nilai kontrak sebesar Rp20.897.805.000 yang masing-masing terdiri dari untuk pekerjaan pengadaan pemeliharaan sebesar Rp14.456.557.500 dan pekerjaan Rp6.441.247.500. Jangka waktu perjanjian terdiri dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan 330 hari kalender sejak tanggal Surat Mulai Perintah kerja (SPMK), jangka waktu kestabilan sistem 90 hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan pengadaan, jangka waktu masa garansi 270 hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan pengadaan, dan jangka waktu pekerjaan pemeliharaan 1826 hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima Akhir pekerjaan pengadaan.

#### 25. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Informasi tambahan atas laporan arus kas adalah sebagai berikut:

31 Desember 2016	31 Desember 2015
(17.664.099.305)	(7.060.450.268)
(926.772.614)	(213.197.527)
(309.845.993)	(16.565.743)
8.544.257.981	3.218.302.927
(10.356.459.931)	(4.071.910.611)
	(17.664.099.305) (926.772.614) (309.845.993) 8.544.257.981

#### 26. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan berjalan diungkapan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

a. Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan. Amandemen ini mengklarifikasi, bukan mengubah secara signifikan, persyaratan PSAK 1, antara lain, mengklasifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

# 27. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan yang disetujui untuk terbit tanggal 27 Januari 2017.